

BAB II

KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT TERHADAP PROGRAM NUKLIR IRAN

Bab ini membahas tentang kebijakan - kebijakan yang dibuat oleh Amerika Serikat terkait Nuklir Iran. Dimana pemaparan akan dimulai dari hubungan Amerika Serikat – Iran terkait nuklir Iran. Sikap Amerika Serikat terhadap perkembangan nuklir Iran dan sanksi – sanksi yang diberikan Amerika Serikat kepada Iran.

A. Hubungan Amerika Serikat-Iran terkait nuklir

1. Sebelum revolusi Islam 1979

Hubungan Amerika Serikat dengan Iran terkait nuklir dimulai saat Amerika Serikat memberikan bantuan teknis melalui kerjasama *The US Atoms for Peace*, sebuah program yang menjamin bahwa poliferasi nuklir Iran tidak akan menjadi ancaman keamanan Internasional. Kerjasama ini dilakukan oleh Shah Reza Pahlevi, paska penggulingan rezim Dr Mohammed Mossaddegh yang dilakukannya dengan bantuan CIA tahun 1953. Dengan bantuan Amerika Serikat di masa pemerintahan Shah Reza Pahlevi, Iran mulai melakukan penelitian dan pengembangan nuklir. Di tahun 1959, Amerika Serikat membangun fasilitas reaktor nuklir dan *Tehran Nuclear Research Center (TNRC)* sebagai sebuah bentuk tindak lanjut dari kerjasama antara Amerika Serikat dan Iran dalam program nuklir Iran. Shah Reza Pahlevi membeli reaktor riset yang memiliki daya sebesar 5 watt dari Amerika Serikat pada tahun 1960-an. Pemerintahan Iran dibawah kepemimpinan Shah Reza Pahlevi sangat berhubungan baik dan harmonis dengan Amerika Serikat.

Pada masa pemerintahan Shah Reza Pahlevi, Iran juga melakukan kerjasama dalam pengembangan program

nuklirnya tahun 1975 dengan perusahaan Jerman Barat “Siemen” yang sepakat untuk membangun dua reaktor nuklir dengan kekuatan masing-masing sebesar 1.300 *Megawatt* di kota Busheher yang terletak di tepi Laut Persia. Perancis juga diajak mendirikan sebuah reaktor nuklir pembangkit tenaga listrik dengan kekuatan 935 *Megawatt* di tahun yang sama. (LibUPNVJ, 2009).

Shah Reza Pahlevi memiliki ambisi menjadikan Iran sebagai poros kekuatan baru di dunia internasional dengan nuklir. Iran membangun 20 reaktor nuklir dan memperjelas program nuklir yang dimilikinya dengan membentuk *Atomic Energy Organization of Iran (AEOI)* di tahun 1974, yang merupakan badan atom nasional untuk mengembangkan pengayaan nuklirnya. Untuk memenuhi kebutuhan mengembangkan nuklirnya dalam hal sumber daya manusia, Iran mengirimkan para ilmuwan dan teknisi ke berbagai universitas dan lembaga-lembaga riset nuklir yang ada di Amerika dan Inggris. yang merupakan badan atom nasional dengan tujuan untuk mengembangkan pengayaan nuklirnya. Shah Reza Pahlevi juga mendirikan Pusat Atom Universitas Teheran.

Pada tahun 1979 Amerika Serikat terus melanjutkan hubungan bilateralnya dengan Iran terkait program nuklir yang dimiliki Iran dengan penandatanganan perjanjian kerjasama nuklir untuk tujuan sipil antara Iran dan Amerika Serikat. Program ini kemudian di kenal dengan sebutan “*The Us Atom For Peace Program*”. Meskipun kedekatan yang dibangun Amerika Serikat dengan pemerintahan Iran dibawah rezim Shah Reza Pahlevi sangat harmonis dan Amerika Serikat menjamin bahwa proliferasi nuklir Iran tidak akan menjadi ancaman, Amerika Serikat tetap memberlakukan batasan yang ekstra ketat dalam mekanisme keterlibatan dan kerjasama para teknisi Iran.

Iran juga ikut menandatangani Perjanjian Non-Profilerasi Nuklir atau NPT (*nuclears non- proliferasi treaty*)

pada tahun 1968, hal ini memungkinkan Iran untuk mengembangkan nuklir untuk tujuan damai. Kemudian pada tahun 1969, Amerika Serikat menyetujui amandemen yang di usulkan Iran untuk memperpanjang jangka waktu kerjasama sampai dengan 10 (*sepuluh*) tahun kedepan mengenai penggunaan energi nuklir. (Chan, 1975, hal. 189)

Perkembangan pengayaan nuklir Iran di masa itu tidak hanya mendapat dukungan dari Amerika Serikat tetapi dari negara barat lainnya. Rezim Syah Reza Pahlavi juga menjajaki sejumlah kerjasama dengan negara-negara Eropa, pada tahun 1971. Iran membangun 4 (*empat*) reactor nuklir dengan masing-masing memiliki kekuatan tidak lebih dari 30 (*tigapuluh*) kilowatt yang terletak di Pusat Riset nuklir Asfahan, pada tahun 1975, Iran menandatangani transaksi pembangunan reaktor nuklir dengan perusahaan Jerman Barat “*siemen*”. (Rahman M. , 2003, hal. 203). Iran juga melanjutkan program nuklirnya dengan membuat kerjasama dengan Perancis untuk mendirikan sebuah reaktor nuklir pembangkit listrik dengan kekuatan 935 (*Sembilanratus tigapuluh lima*) megawatt di kawasan Ahwaz yang tak jauh dari perbatasan Irak.

Perkembangan nuklir yang dimiliki Iran terus maju berkembang pesat akibat adanya kedekatan hubungan yang baik antara Iran dengan negara-negara barat. Akan tetapi, rakyat Iran yang dipimpin oleh Imam Ayatullah Khomeini merasa bahwa Iran kehilangan jati dirinya sebagai negara muslim di Timur Tengah, Amerika Serikat dengan kediktatoran yang dimiliki Shah Reza Pahlevi dapat mengeksploitasi Iran dan menjadikan Iran tempat singgah dalam mengontrol negara-negara di kawasan Timur Tengah. Imam Ayatullah Khomeini beserta rakyat menyerukan anti *westernisasi* yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Barat, kemudian menentang penindasan yang telah dilakukan dengan menegakkan keadilan. Kepemimpinan Shah Reza Pahlevi merugikan Iran, karena pada rezim yang dijalankannya terjadi penindasan, korupsi dan westernisasi besar-besaran di Iran.

Pemberontakan yang dilakukan oleh rakyat dalam menuntut untuk mengembalikan jati diri Iran sebagai negara muslim akhirnya menggulingkan pemerintahan Shah Reza Pahlevi di tahun 1979, digulingkannya Shah Reza Pahlevi oleh rakyat Iran yang menuntut keadilan akibat dieksploitasinya oleh Amerika Serikat dan Barat ini dikenal dengan sebutan Revolusi Islam.

2. Pasca revolusi Islam 1979

Pasca Revolusi Islam yang terjadi di Iran pada tahun 1979, Amerika Serikat melakukan pemutusan hubungan diplomatiknya dengan Iran dan membatalkan kerjasama yang telah dibuat. Juga terjadi pembekuan kekayaan Iran yang ada di Amerika Serikat. Amerika Serikat yang awalnya mendorong Iran untuk mendirikan reaktor nuklir untuk pemenuhan kebutuhan energinya, namun pasca Revolusi Islam di Iran terjadi pemberhentian pasokan *Uranium*, padahal proses pembangunan reaktor *Bushher-1* telah mencapai 90%, dimana 60% dari keseluruhan telah selesai di pasang. Hal ini kemudian di ikuti oleh Pemerintah Jerman yang melarang melanjutkan pembangun dua reaktor nuklir yang saat itu baru rampung 80 % dan 50%. Program pelatihan yang di berikan oleh *Massachusetts institute of teknologi* (MIT) sejak tahun 1975 kepada para teknisi Iran pun di berhentikan. (Sahimi, 2014)

Semua pengaruh Amerika Serikat di Iran berhasil dihilangkan Imam Ayatullah Khomeini sejak Khomeini memimpin Iran, Ayatullah Khomeini selalu mengatakan “rezim Amerika merupakan musuh pemerintahan Islam (Iran) dan revolusi kita”, Khomeini juga beranggapan Amerika Serikat membahayakan kemerdekaan Iran dan kemajuan Islam di seluruh dunia. Kondisi hubungan kedua negara menegang pada tanggal 4 november 1979, para pendukung Khomeini memasuki gedung kedutaan Amerika di Teheran sambil meneriak “matilah Amerika” serta melakukan penyanderaan terhadap diplomat Amerika Serikat, staf, dan

prajurit militer Amerika Serikat. Setelah beberapa upaya diplomasi akhirnya setelah 444 hari para sandera di bebaskan, Iran pun dikenai sanksi ekonomi selama 30 tahun oleh Amerika. (Alcaf, 2008)

Ketegangan hubungan kedua negara ini terus berlanjut sampai pada pemerintahan Presiden Hashemi Rafsanjani (1989-1997) di Iran yang tidak sedikitpun membuka kerjasama dengan Amerika meskipun memiliki kebijakan perbaikan hubungan *rapprochement* (kebijakan membuka hubungan kerjasama) dengan Barat. Saat Iran dibawah kepemimpinan Rafsanjani, Iran membuat *Open Door Policy* demi pembangunan ekonomi Iran. Semua negara diperbolehkan berkerjasama kecuali Amerika Serikat dan Israel yang merupakan aliansi Amerika di Timur Tengah. Pembangunan ekonomi yang sangat pesat yang terjadi di Iran di rezim ini membuat Presiden Rafsanjani dijuluki sebagai “Bapak Pembangunan Iran”. Program nuklir Iran juga sempat dilanjutkan kembali, tapi tidak bertahan lama karena terjadi kebocoran di salah satu instalasi nuklir bagian Utara Iran.

Pada saat kepemimpinan Presiden Moh Khatami (1997-2005) yang berasal dari golongan reformis, terjadi pembukaan sedikit hubungan dengan Amerika. Presiden Khatami mempunyai misi “ Toleransi, Moderenisme, Keterebukaan”, membuat Amerika yang saat itu dipimpin oleh Presiden Bill Clinton (1993-2001) yang berasal dari partai Demokrat yang juga mengedepankan diplomasi dapat membangun kembali hubungan antar dua negara ini. Akan tetapi, pengaruh *Mullah* (kelompok ulama-ulama Iran) di lembaga tinggi Iran tetap ada meskipun Imam Ayatullah Khomeini yang merupakan bagian kelompok ulama besar Iran yang berhasil melakukan Revolusi Islam tidak lagi memegang tampuk kekuasaan. Pengaruh *Mullah* mampu bertahan lama di Iran bahkan sampai di kehidupan sosial dan politik Iran. Presiden Khatami juga memulai program nuklir Iran di tahun 2003, namun mengalami kevakuman lagi akibat adanya tekanan dari Amerika Serikat dan Israel.

Amerika Serikat dibawah kepemimpinan Bill Clinton memiliki misi untuk menciptakan sistem multi partai, liberalisasi dalam bidang ekonomi, sosial maupun budaya di Iran. Demokrasi menjadi seruan utama Amerika Serikat untuk memulai kembali memasuki ranah politik domestik Iran, misi yang diinginkan Amerika Serikat sepadan dengan kebijakan-kebijakan yang dimiliki Iran saat itu. Akan tetapi percobaan untuk memperbaiki hubungan kedua negara ini tidak begitu berhasil. Hubungan antar kedua negara tidak dapat kembali menjadi harmonis seperti dahulu pada masa sebelum Revolusi Islam Iran (Rahman M. , 2003).

Pergantian kepemimpinan Amerika Serikat oleh George W. Bush (2001-2009) yang berasal dari partai Republik semakin membuat keruh hubungan kedua negara ini, bukan memperbaiki ketegangan yang ada. Pada tahun 2005, kontroversi seputar isu program nuklir Iran semakin memuncak menjadi krisis internasional. pada Januari 2005, dalam sebuah wawancara di televisi NBC, Presiden Bush menanggapi perkembangan program nuklir Iran menyatakan bahwa serangan militer terhadap fasilitas nuklir Iran adalah salah satu alternatif terutama jika Iran terus bersikeras untuk melanjutkan program nuklirnya, dan menolak untuk terbuka dan transparan mengenai program nuklirnya tersebut (Reuters, 2017)

Pada tahun 2005, respon Amerika Serikat dan negara-negara Barat terhadap program nuklir Iran semakin gencar diantaranya melalui pemberitaan-pemberitaan di media, dimana spekulasi tentang kelanjutan program nuklir tersebut ramai menjadi topik pembahasan terutama setelah kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi setelah pergantian Presiden. Diantara topik pembahasan yang ramai dibicarakan, adalah munculnya dugaan-dugaan mengenai karakter kepemimpinan dan latar belakang para calon Presiden Iran. Rafsanjani misalnya, dipandang oleh negara-negara Barat dan Amerika Serikat sebagai tokoh pragmatis yang dapat membuka kembali dialog aktif antara Iran dan negara-negara

Barat. Sedangkan Ahmadinejad dipandang sebagai tokoh Konservatif garis keras dengan latar belakang revolusioner yang dipandang cenderung menggunakan pendekatan konfrontatif dengan Amerika Serikat (Recknagel, 2008)

Puncak ketegangan terkait nuklir Iran ini terjadi pada masa Presiden Ahmadinejad (2005-2013) yang akhirnya terpilih menggantikan Khatami. Presiden Ahmadinejad mendukung Revolusi Islam yang terjadi di masa lalu dan menolak hegemoni Amerika Serikat serta meneruskan program nuklir yang dimiliki Iran. Menjadikan Nuklir sebagai prioritas utama dan nuklir Iran sebagai tiket kemenangan “*Nuke for Peace*”. Namun demikian, pergantian pemerintahan di Iran tidak memiliki pengaruh yang cukup signifikan pada kebijakan nuklir Iran ataupun terhadap proses negosiasi yang sedang berlangsung baik dengan IAEA ataupun negara-negara Barat (Recknagel, 2008).

Presiden George W. Bush membawa masalah pengayaan nuklir Iran kepada dunia Internasional dan memberikan sanksi melalui NPT, IAEA, maupun mempengaruhi Dewan Keamanan PBB untuk menghentikan nuklir Iran. Cara militeristik juga ikut digunakan dengan memberikan ancaman kepada Iran. Namun Iran terus berjuang mempertahankan nuklir yang dimilikinya dengan cara diplomasi dan menjalin hubungan dengan berbagai negara dan organisasi internasional untuk mendapatkan dukungan terkait dengan program nuklirnya. Iran berupaya dengan cara-cara persuasif, juga berkompromi dan bahkan ancaman.

Pada 31 Mei 2006, Amerika Serikat melalui Sekretaris Negaranya, Condoleezza Rice, mengumumkan akan berbicara dengan Iran bersama UE-3 apabila Tehran menghentikan segala aktifitas nuklirnya dan mengizinkan inspeksi (Weisman & O’Neil, 2006) Namun Iran tidak mengindahkan tawaran Amerika Serikat, insentif serta laporan IAEA. Kemudian pada 8 Juni 2006 Iran menerima resolusi dan sanksi Dewan Keamanan PBB. Iran juga tetap mengajak

Barat untuk bernegosiasi meskipun ajakan tersebut tidak diindahkan oleh Dewan Keamanan PBB dan Dewan Keamanan PBB bereaksi dengan mengeluarkan resolusi 1696 pada 31 Juli 2006. Banyak negosiasi dan usaha penyelesaian terkait masalah nuklir ini agar terselesaikan. Amerika Serikat terus berpegang teguh dengan upaya nya untuk menghapuskan nuklir Iran dan Iran juga tetap pendirian dengan menjaga program nuklirnya agar tidak dimusnahkan meskipun upaya pertahanan ini membuat Iran menerima sanksi maupun kecaman di dunia Internasional.

Program nuklir Iran juga didefinisikan sebagai ancaman dan berpotensi untuk menciptakan senjata nuklir. Pemerintah Iran dipandang memiliki ambisi senjata nuklir. Dalam sebuah tajuk rencana berjudul “ Iran Ancam Gunakan Senjata Minyak”, dituliskan bahwa program nuklir Iran telah menempatkan negara itu dalam posisi sulit. Amerika Serikat dan Uni Eropa mengancam menjatuhkan sanksi bahkan serangan militer jika tidak menghentikan program nuklirnya, yang dituduh berpotensi menciptakan senjata nuklir (Alatas, 2014). Iran membantah bahwa nuklirnya untuk tujuan militer dan bom atom sebagaimana ditegaskan Ali Larijani sebagai Sekretaris Dewan Keamanan Nasional dan Penanggung jawab Nuklir Iran: "Senjata nuklir sama sekali tidak ada dalam doktrin pertahanan Republik Islam Iran." Hingga saat ini Iran telah melakukan banyak upaya agar mendapatkan dukungan dari negara-negara terkait dengan nuklirnya yang bertujuan damai (Kholil A. H., 2014)

Sebelum masa pemerintahan Presiden Mahmoud Ahmadinejad, Iran tidak melakukan hubungan diplomatik baik dengan Amerika Serikat maupun Israel. Israel menganggap Iran sebuah ancaman yang serius karena program nuklirnya, dan pembuatan misil jarak jauh. Israel juga telah menekan internasional untuk meminta Iran menghentikan nuklirnya. Iran mengancam akan balik menyerang Amerika Serikat apabila negara tersebut menginvasi Iran. Dan yang pertama kali akan diserang Iran adalah sekutu terdekat Amerika Serikat

yaitu Israel. Demikian ungkapan Komandan Garda Revolusi, Mohammad Ebrahim seperti dilansir dari *Associated Press*, “ kita telah memperingatkan, bila AS ambil tindakan yang membahayakan bagi kita, maka tempat pertama yang menjadi sasaran kami adalah Israel.” (Kholil A. H., 2014)

Saat Barack Obama memimpin Amerika Serikat barulah permasalahan ini menemukan titik terang, Iran menyetujui untuk menandatangani *Joint Comprehensive Plan of Action*, sebuah negosiasi yang cukup alot yang pada akhirnya disetujui antara Iran dengan kelompok P5+1 di Vienna, Austria.

B. Sikap Amerika Serikat terhadap perkembangan nuklir Iran melalui jalur Internasional.

1. *Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT) dan Internasional Atomic Energy Agency (IAEA)*

Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT) merupakan salah satu bentuk dari rezim non proliferasi nuklir paling awal yang menindaklanjuti traktat yang dibuat pada tahun 1963 mengenai pelarangan adanya uji coba senjata nuklir di udara, angkasa, maupun dibawah laut (Jones, 1998). *Treaty On The Non Proliferation Of Nuclear Weapon (NPT)* juga merupakan perjanjian internasional yang mengatur mengenai larangan penyebaran senjata nuklir. Perjanjian ini memiliki tiga prinsip utama yaitu: Nonproliferasi, perlucutan senjata, dan hak untuk mengembangkan teknologi nuklir untuk tujuan damai.

Didalam NPT ditetapkan kebijakan terkait kepemilikan senjata nuklir, bagi negara-negara seperti Amerika, Inggris, Rusia, Cina, serta Prancis yang telah memiliki nuklir sebelum perjanjian ini dibuat agar mengurangi kepemilikan senjata nuklir yang mereka miliki.

Nuklir tersebut dapat dipergunakan sebagai riset, pengembangan pembangkit listrik, teknologi, dan kemaslahatan masyarakat dunia. Akan tetapi bagi negara-negara yang tidak memiliki nuklir dilarang mengembangkan dan menciptakan senjata nuklir. Sampai akhir tahun 1998 terdapat 180 negara non-nuklir dan 5 negara Dewan Keamanan PBB yang memiliki nuklir (Militer, 2012). Maka pada 29 Juli secara resmi institusi *International Atomic Energy Agency* (IAEA) berada dibawah PPB. Setelah terbentuknya IAEA, banyak hukum dan perjanjian yang ditetapkan karena efek nuklir yang apabila disalahgunakan bisa menjadi senjata pemusnah masal yang bisa mengancam kedamaian dan keamanan dunia.

Terkait kepemilikan nuklir yang dimiliki Iran, aktivitas nuklir Iran telah diawasi oleh IAEA (*International Atomic Energy Agency*) dan tidak melanggar NPT (*Non Proliferation Treaty*), negara-negara Barat tetap saja melakukan intervensi terhadap pengembangan nuklir Iran. Sebelumnya, pada tahun 2003 IAEA telah melaporkan tidak ada indikasi bahwa Iran akan mengembangkan senjata nuklir, IAEA hanya menemukan bahwa Iran melakukan proses pengayaan uranium dan plutonium (Albright & Hinderstein, 2011).

Internasional Atomic Energy Agency (IAEA) berperan sebagai organisasi internasional yang mengawasi perkembangan teknologi nuklir agar tetap di kembangkan untuk tujuan damai dan tidak membelok kearah pengembangan senjata nuklir. Sejak tahun 2002 Iran bersikap kooperatif dengan kesediaannya untuk diawasi perkembangan nuklirnya oleh IAEA. Namun, pada 6 Juni 2003 untuk pertama kalinya IAEA mengeluarkan laporan tentang program nuklir Iran, dinyatakan bahwa Iran tidak melaksanakan kewajibannya untuk menghitung jumlah material, melaporkan proses dan penggunaannya, dan mendeklarasikan fasilitas penyimpanan dan pemrosesannya. Laporan tersebut langsung dibantah Iran dan perwakilan Iran di IAEA menyatakan bahwa Iran telah

melaksanakan kewajibannya sesuai NPT dan Iran menolak dikatakan tidak menghormati kesepakatan internasional karena tidak melaporkan material nuklirnya.

Pada tahun tersebut IAEA yang beranggotakan sebanyak 56 negara, salah satunya negara Iran. Negara Iran secara resmi bergabung dan menjadi anggota IAEA pada tahun 1957 (IAEA, 2017). IAEA berkontribusi untuk menggalakkan perdamaian dunia, menjaga keamanan dunia, mencegah penyebaran senjata nuklir, dan mendukung serta membantu pengembangan teknologi nuklir untuk keperluan sipil (HS, 2005). Dalam menjalankan fungsinya, IAEA memiliki kewajiban untuk mengontrol negara-negara yang memiliki nuklir.

Kekhawatiran dunia internasional terhadap penggunaan nuklir Iran sebagai senjata pemusnah massal didasarkan pada sikap Iran yang enggan melaporkan aktivitas pengembangan nuklirnya pada Badan Atom Internasional (IAEA). Sejak tahun 2006, Iran dianggap tidak kooperatif dalam melakukan pemantauan proliferasi nuklir dengan IAEA, sehingga Iran dicurigai melakukan pemanfaatan nuklir lebih dari sekadar untuk kebutuhan sumber energi. Oleh karena itu muncul Resolusi yang dikeluarkan oleh DK-PBB berupa resolusi 1737/2006, 1747/2007, dan 1803/2008 dari Dewan Keamanan PBB. Ketiga resolusi tersebut menyiratkan hal yang sama, yaitu desakan terhadap Iran untuk melakukan transparansi proliferasi nuklir dan pengembargoan yang semakin meluas. Sebagai usaha menekan Iran supaya tidak mengembangkan nuklir untuk kepentingan militer (Rohma, 2014).

Amerika Serikat yang terus mendorong IAEA untuk memproses dan memantau program nuklir Iran membuat IAEA terus melakukan resolusinya kepada Iran seperti ketiga resolusi tersebut. Dari laporan IAEA mulai tahun 2003 sampai dengan tahun 2012, Iran menunjukkan perilaku yang tidak transparan pada program nuklirnya. IAEA yang awalnya menyatakan bahwa pengembangan nuklir tersebut tidak

mengarah kepada pembuatan senjata nuklir mulai khawatir, dengan berbagai alasan yang beralasan. Terdapat perilaku-perilaku yang mencurigakan yang di tunjukan oleh Iran. Menurut Amerika Serikat hal ini yang menjadikan permasalahan nuklir Iran sampai untuk ditindak lanjuti Dewan Keamanan PBB.

2. Resolusi DK PBB beserta sanksi

Pada Tanggal 25 Februari 2005, Presiden George W. Bush menyatakan bahwa program uranium Iran harus segera dihentikan. Iran merasa tertekan dengan pernyataan tersebut dan merasa memiliki hak untuk menggunakan energi nuklir untuk tujuan damai sesuai dengan aturan NPT maupun pengamanan dari IAEA. Kemudian di tanggal 24 September 2005, IAEA mengeluarkan resolusi bahwa isu nuklir Iran akan dibawa ke Dewan Keamanan. Resolusi ini disetujui melalui 22 suara, satu negara tidak setuju dan 12 negara abstain. Dengan dikeluarkan isu ini terlihatlah pembagian negara maju dan berkembang. Berbagai negara, seperti Rusia, Cina dan Afrika Selatan tidak setuju dengan metode yang diinginkan Amerika untuk menyelesaikan krisis Iran.

DK-PBB terus berusaha menghukum Iran atas kepemilikan nuklirnya, kecuali Iran mau menghentikan program pengayaan nuklirnya. Akan tetapi, karena adanya dorongan dari negara-negara berkembang lainnya membuat Iran terus yakin mengembangkan dan melanjutkan program nuklirnya. DK-PBB terus memberikan resolusi serta tawaran berupa bantuan ekonomi dan insentif lainnya. Dan dibawah kepemimpinan Ahmadinejad Iran tidak mundur untuk menunjukkan kepada dunia bahwa nuklir yang dibangunnya untuk tujuan damai. Dalam rentang waktu 2006-2015 DK-PBB sebagai penjaga perdamaian dunia telah mengeluarkan resolusi kepada Iran yang mengakibatkan Iran kesulitan dalam menjalankan sektor ekonominya.

Tabel 2.1 Resolusi yang diberikan oleh Dewan Keamanan PBB kepada Iran (Atmaja, 2017) :

No	Resolusi	Tahun	Substansi
1	1696	31 Juli 2006	Membuat panggilan IAEA bagi Iran untuk menghentikan pengayaan kegiatan terkait dan pengolahan mengikat secara hukum untuk pertama kalinya.
2	1737	23 Des 2006	Memberlakukan sanksi ekonomi dan komersial berupa pembekuan terhadap 10 entitas penting terkait dengan program nuklir dan balistik
3	1747	24 Maret 2007	Membekukan aset 13 entitas baru yang terkait dengan program nuklir atau Pengawal Revolusi Iran. Serta embargo pembelian senjata dan pembatasan pinjaman ke Iran
4	1803	3 Maret 2008	Larangan entitas dan individu dengan membekukan aset & larangan perjalanan
5	1835	27 September 2008	untuk memenuhi sepenuhnya dan tanpa penangguhan kewajiban (sebagaimana resolusi PBB mengenai hal tersebut) dan untuk memenuhi persyaratan Dewan Gubernur IAEA
6	1929	9 Juni 2010	Menempatkan pembatasan baru pada investasi Iran dan melarang penjualan ke Iran dari senjata berat tertentu (tank, pesawat tempur, dan helikopter)
7	2224	9 Juni 2015	Bersamaan dengan implementasi yang diverifikasi IAEA mengenai tindakan terkait nuklir yang disepakati oleh Iran dan akan menetapkan batasan spesifik, seperti yang ditentukan dalam Lampiran V yakni Ketentuan resolusi Dewan Keamanan sebelumnya telah dihentikan dengan dikenakan penenaan kembali komitmen JCPOA
8	2231	20 Juli 2015	Mengatur penghentian ketentuan resolusi Dewan Keamanan sebelumnya mengenai masalah nuklir Iran dan menetapkan batasan khusus yang berlaku untuk semua Negara tanpa kecuali, serta mendesak penuh implementasi JCPOA.

Sejak tahun 2006 sampai tahun 2015 sejak diangkatnya isu nuklir Iran, DK-PBB memberikan paket sanksi

berupa resolusi-resolusi yang terus menyulitkan Iran. Selain ultimatum, sanksi dan insentif, resolusi ini menawarkan jalan keluar kepada Iran. Solusi atau jalan keluar yang ditawarkan seolah-olah menggunakan prinsip "*termination to termination*" dan "*suspension for suspension*". Prinsip pertama, sanksi akan dihentikan apabila Iran menghentikan program pengembangan nuklirnya sesuai tiga resolusi Dewan Keamanan PBB. Kedua, sanksi akan ditunda apabila Iran menunda program pengembangan nuklirnya. DK-PBB memberikan ancaman dan sanksi tegas bagi Iran untuk mengurungkan niatnya mengembangkan teknologi nuklir dimasa yang akan datang. Namun ketegangan antara DK-PBB dengan Iran tidak berhenti dan mungkin masih menunggu perkembangan selanjutnya. Namun sampai saat ini Iran tetap berpegang teguh pada pendiriannya untuk mengembangkan tekonologi nuklir yang bertujuan damai. Sebagai hak yang dimiliki oleh Negara-negara NPT (Landasan Teori, 2015)

Keteguhan Iran dalam mengembangkan nuklirnya tetap tidak tergoyahkan dengan ultimatum dan sanksi serta tawaran insentif tersebut karena bagi Iran mematuhi resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB berarti mengakui bahwa Iran bersalah dan juga melanggar NPT. Iran tetap mempertahankan program pengembangan nuklirnya dan Iran tidak akan mundur selangkahpun untuk nuklir damai yang merupakan hak Iran dan dijamin oleh Traktat NPT (Iranian News Agency (IRNA), 2007).

Keteguhan Iran ini juga didukung oleh laporan IAEA tertanggal 23 Mei 2007 yang menyatakan bahwa program pengembangan nuklir Iran berjalan sesuai dengan aturan dan hukum internasional yang merupakan hak Iran yang dijamin oleh IAEA (Iranian News Agency (IRNA), 2007). Pada 30 Agustus 2007, IAEA memperkuat laporan sebelumnya dengan menyatakan bahwa Iran memperkaya uraniumnya sesuai yang diharapkan dan tidak menyimpang dari jumlah yang telah ditentukan (The Washington Post, 2007). China dan Rusia pun menyatakan empati dan dukungannya terhadap Iran untuk

terus bekerja sama dengan IAEA (Xinhua News Agency, 2007). Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan tetap akan mendukung Iran karena selama ini Rusia satu-satunya negara yang membantu Iran dalam program pengembangan nuklirnya (The Moscow Times, 2007)

Terpilihnya Hassan Rouhani sebagai presiden baru Iran pada Juni 2013, membawa harapan baru bagi Iran. Rouhani dianggap lebih moderat dan terbuka terhadap pihak Barat. Hassan Rouhani melakukan beberapa tindakan yang sudah lama tidak dilakukan oleh pemimpin Iran sebelumnya. Ia menelepon Obama selama 15 menit waktu ia berkunjung ke PBB demi membicarakan hubungan politik kedua negara yang memecahkan suasana tabu selama 34 tahun yang menyelimuti hubungan Iran-Amerika (Rizky, 2013)

Tidak hanya sanksi dari PBB, Amerika Serikat sebagai pihak yang paling menekan Iran juga telah memberikan sanksi sejak tahun 1980 dengan melarang bisnis yang dilakukan oleh organisasi atau individu Amerika yang ingin melakukan perdagangan dengan Iran kecuali dengan persetujuan Departemen Keuangan.

Selanjutnya Amerika seringkali menerapkan beberapa sanksi, seperti:

1. Memperkenalkan pembatasan keuangan lebih lanjut dengan melarang bank-bank Amerika bertindak sebagai perantara dana ke dan dari Iran;
2. Undang-undang yang melarang pasokan bahan bakar ke Iran, yang sangat diperlukan oleh produk olahan, dan menghukum kelompok-kelompok asing berinvestasi di sektor minyak Iran;
3. Pemberian sanksi terhadap individu yang mendukung pengembangan sektor minyak Iran;

4. Pembekuan aset lembaga keuangan asing yang berhubungan dengan Bank Sentral Iran yang berkaitan dengan sektor minyak;
5. Pemberlakuan sanksi ekonomi baru terhadap sektor ekspor minyak Iran dan pada dua bank Cina dan Irak yang dituduh melakukan bisnis dengan Iran;
6. Pemberlakuan sanksi baru yang berfokus pada mata uang riyal untuk pertama kalinya di tahun 2013 dan juga sektor otomotif